

**FAILURE IN THE MANAGEMENT OF MANDIRI VILLAGE-OWNED
ENTERPRISE (BUMDES) TANJUNG MEDAN VILLAGE, CERENTI
DISTRICT, KUANTAN SINGINGI DISTRICT, 2019-2020**

By: Lidia Pebri

E-mail : lidia.pebri4320@student.unri.ac.id

*Department of Government Science,
Faculty of Social and Political Sciences, Riau University
Bina Widya Campus Jl. H.R. Soebrantas Km. 12.5 Sim. New Pekanbaru 28293
Supervisor: Dr. Tito Handoko, S.IP., M.Sc*

ABSTRACT

Tanjung Medan Village has a BUMDes which operates in the field of selling goods and services. Tanjung Medan BUMDes was initially formed on December 18 2019. According to the mandate of PERDA Number 5 of 2019 concerning the establishment of BumDes, Kuansing Regency, article 16 explains that BumDes must at least develop and have a profit of at least 10 % and the last 2 years. However, in this village it is not running and does not fulfill these benefits. The aim of the research is to find out and analyze what factors influence the failure of BumDes Mandiri management in Tanjung Medan Village, Cerenti District, Kuantan Singingi Regency. This research uses the theory of Good Governance, which has been well known in Indonesia since the 1990s. This research method is descriptive research with a qualitative approach. The data sources used are primary and secondary data. The data collection technique used was through interviews and documentation.

The research results show that the failure of the Mandiri Village-Owned Enterprises (BUMDES) in Tanjung Medan Village, Cerenti District, Kuantan Singingi Regency in 2019-2020 has not gone well, this is due to a lack of communication between the village government and BUMDes management. This is due to a lack of awareness of BUMDes management which has never received guidance from its directors or members from either the province, district or village government itself. This research concludes 2) The obstacles that occurred in Mandiri Village-Owned Enterprises (BUMDES), Tanjung Medan Village, Cerenti District, Kuantan Singingi Regency in 2019-2020, namely not implementing the principles of good governance due to a lack of understanding of both the BUMDes Director and its members and no efforts by the village government to This resulted in failure in running a business entity in the village.

Keywords: Failure, Management, Village-Owned Enterprises (BUMDes)

PENDAHULUAN

Desa adalah unit terkecil dari negara yang terdapat dengan masyarakat dan secara ril langsung menyentuh kebutuhan masyarakat untuk disejahterakan. Menurut Undang-Undang Desa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsamasyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kemudian dalam berkembangnya ilmu pengetahuan, dibentuk suatu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pembentukan BUMDES didasarkan pada Peraturan Desa dan tidak membutuhkan pengesahan dari Akta Notaris. Untuk mencapai tujuan dan sasaran BUMDES sangat diperlukan penerapan manajemen secara profesional yang meliputi: Manajemen Sumber Daya Manusia, Manajemen Keuangan, Manajemen Produksi, dan Manajemen Pemasaran (Sihabudin, et al.,2009).

Beberapa peran penting BUMDES: Pertama, BUMDES akan mampu menekan laju migrasi penduduk dari desa ke perkotaan; Kedua, BUMDES dapat mendorong tumbuh dan berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat desa; Ketiga, BUMDES dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat desa sehingga tidak terjebak oleh rentenir atau lintah darat; Keempat, BUMDES dapat menjadi sumber Pendapatan Asli Desa (PADes) sehingga anggaran pembangunan di pedesaan dapat ditingkatkan; Kelima, mendorong berkembangnya usaha sektor informal untuk dapat menyerap tenaga kerja masyarakat di desa; dan Keenam, meningkatkan kreativitas berwirausaha anggota masyarakat desa yang berpenghasilan rendah (Gunawan, 2011).

Desa Tanjung Medan memiliki BUMDes yang bergerak pada bidang penjualan barang dan jasa, BUMDes Tanjung Medan Awal terbentuknya Pada 18 Desember 2019. BUMDes Tanjung Medan tersebut memilki 2 Unit Usaha sebagai berikut:

Tabel 1.1 Berikut Jenis Kegiatan yang Dikelola oleh BUMDes di Desa Tanjung Medan di Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi:

No	Jenis Usaha	Status	Tahun	Jumlah Dana
1.	Toko Serba Ada (Toserba)	Sudah Tidak Beroperasi	2019	Rp.155.000.000,-
2.	Ternak Ayam Petelur	Sudah Tidak Beroperasi	2019	Rp.51.000.000,-

Sumber: Data Olahan Penelitian 2019

Seharusnya menurut Amanat PERDA Nomor 5 Tahun 2019 tentang pendirian BUMDes Kabupaten Kuansing pasal 16 menjelaskan bahwa BUMDes setidaknya harus berkembang dan memiliki keuntungan minimal 10% dalam 2 tahun terakhir. Kemudian pada pasal 6 PERDes Nomor 7 Desa Tanjung Medan Kecamatan Cerenti menyebutkan,

“Penyertaan modal BUM Desa digunakan sesuai hasil uji kelayakan usaha yang telah disetujui pemerintah daerah dengan peruntukan, modal pengembangan usaha sebesar 90% dan operasional pengurus BUMDesa 10%. Dalam hal ini, penulis akan memaparkan rincian anggaran BUMDesa yang ada Desa Tanjung Medan Kecamatan Cerenti:

Tabel 1.2 Rincian Anggaran BUMDes di Desa Tanjung Medan Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi

No	Sumber Dana	Anggaran
1.	Penyertaan Modal BUMDesa	Rp. 186.000.000,-
2.	Bersumber dari DD APBN	Rp. 50.000.000,.
3.	Bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi Riau Khusus Kepada Desa	Rp. 136.000.000,
4.	Kegiatan Pengadaan Kios Desa	Rp. 136.000.000,-
5.	Bankeu Provinsi Riau	Rp. 86.000.000,.

Sumber: Data Olahan Penelitian 2019

Akan tetapi BUMDes di desa ini bangkrut (tidak berjalan) dan tidak memenuhi keuntungan tersebut. Sehingga tata kelola perlu di teliti untuk mengetahuinya. Dalam pengakuan yang didapat dari direktur BUMDes Tanjung Medan, Bapak Jasmi, ia mengatakan bahwa BUMDes Tanjung Medan telah berdiri sejak tahun 2019, dan pada tahun 2020 keseluruhan BUMDes Tanjung Medan sudah berhenti beroperasi. Dan dari observasi awal yang dilakukan penulis saat melihat tempat lokasi BUMDes Tanjung Medan untuk Toko serba Ada TJM mandiri, Ternak Ayam Petelur, untuk bangunannya masih berdiri sedangkan bangunan tersebut dalam kondisi tertutup. Alasan kenapa Toko serba ada TJM Mandiri ini sudah tidak beroperasi lagi dapat dijelaskan bahwa tidak mampu bersaing dengan beberapa toko serba ada milik masyarakat yang ada di desa Tanjung Medan tersebut, sedangkan ternak ayam bertelur itu gagal dikarenakan banyak ayam yang terkena virus sehingga menyebabkan kematian dan banyak dari ayam-ayam tersebut di jual oleh direktur sendiri sehingga tidak adanya transparansinya kepada masyarakat dan tidak dapat di kembangkan sebagaimana mestinya.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan fenomena yang telah dikemukakan tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mandiri sangat penting, akan tetapi dengan belum optimalnya tata kelola tersebut maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian yakni :

Apa saja Faktor yang

Mempengaruhi kegagalan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mandiri di Desa Tanjung medan Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi?

KERANGKA TEORI

Good governance menurut Sadjijono (2007) *Good Governance* mengandung arti “Kegiatan suatu lembaga pemerintah yang dijalankan berdasarkan kepentingan rakyat dan norma yang berlaku untuk mewujudkan cita-cita.”. Kemudian kegiatan badan administratif yang dilakukan berdasarkan norma umum untuk mewujudkan kepentingan dan cita-cita rakyat aspirasi negara. Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Menurut Teori Good Governance Ada Tiga Yaitu :

1. Transparansi atau keterbukaan sehingga dapat diakses oleh semua orang
2. Akuntabilitas Dimana Setiap Proses Harus Dapat Dipertanggung Jawabkan Kepada Publik.
3. Partisipatif merupakan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dalam membuat suatu kebijakan yang melibatkan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku,

persepsi, motivasi, tindakan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa (Lexy, 2012).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kegagalan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) MANDIRI Desa Tanjung Medan Kecamatan Cerenti Kabupaten Kauantan Singingi Tahun 2019-2020.

1. Prinsip Transparansi

Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance*, prinsip transparansi yang diartikan sebagai informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Prinsip ini sangat penting bagi muzaki dan merupakan hak muzaki untuk mendapatkan informasi yang akurat dan tepat pada waktunya mengenai semua hal yang penting tentang kinerja (Yulianti, 2017) Transparansi merupakan bentuk upaya keterbukaan dari suatu perusahaan yang berkaitan tentang proses pengambilan keputusan serta keterbukaan dalam memberikan informasi secara relevan yang berkaitan dengan perusahaan.

2. Prinsip Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas adalah pertanggungjawaban, merupakan kejelasan fungsi, struktur, system dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

Prinsip ini diwujudkan dalam bentuk penyajian laporan keuangan pada waktu yang tepat dan dengan cara yang tepat (Yulianti, 2017)

Akuntabilitas disini berupa kejelasan baik dari struktur, pertanggung jawaban perusahaan, fungsi, sistem yang mana bertujuan agar dalam pelaksanaan perusahaan tersebut mampu mencapai kinerja yang berkesinambungan serta mampu berjalan secara efektif serta sesuai tujuan dari perusahaan tersebut.

3. Prinsip Partisipatif

Prinsip Partisipatif merupakan suatu proses teknis untuk memberikan kesempatan dan wewenang yang lebih luas kepada masyarakat untuk secara bersama-sama memecahkan berbagai persoalan. Pembagian kewenangan ini dilakukan berdasarkan tingkat keikutsertaan (level of involvement) masyarakat dalam kegiatan tersebut. Partisipasi masyarakat bertujuan untuk mencari solusi permasalahan yang lebih baik dalam suatu komunitas dengan membuka lebih banyak kesempatan bagi masyarakat untuk ikut memberikan kontribusi sehingga implementasi kegiatan berjalan lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan. Dari banyak pengalaman tentang pelaksanaan pembangunan yang dijumpai banyak

pembangunan yang dikatakan untuk kepentingan rakyat ternyata kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan yang dikehendaki rakyat sebagai penikmat pembangunan tersebut.

4.1 Kesimpulan

- 1) Berdasarkan analisis wawancara penelitian mengenai kegagalan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Mandiri Desa Tanjung Medan Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019-2020 belum berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan Kurangnya Komunikasi antara pemerintah desa dengan pengelolaan BUMDes. ini dikarenakan kurangnya kesadaran pengelolaan BUMDes yang belum pernah mendapatkan pembinaan terhadap direktur maupun anggotanya baik dari provinsi, kabupaten maupun pemerintahan desa itu sendiri. Dan tidak menjalankan prinsip *good governance* dikarenakan kurangnya pemahaman baik Direktur BUMDes maupun anggotanya dan tidak ada upaya pemerintah desa akan hal ini, sehingga mengalami kegagalan dalam menjalankan badan usaha di desa tersebut.

4.2 Saran

- 1) Disarankan kepada kepala dinas dan Pemerintah desa harus memberikan pengawasan kepada kinerja BUMDes dalam menjalani usaha yang ada di desa tanjung medan kecamatan cerenti.
- 2) Disarankan Pemerintah Desa Tanjung Medan harus melakukan evaluasi terkait pengelolaan BUMDes yang ada di Desa

Tanjung Medan supaya BUMDes yang ada di Desa Tanjung Medan dapat berjalan dengan baik.

- 3) Disarankan Pemerintah Desa harus melibatkan masyarakat dalam pengawasan terhadap kinerja BUMDes.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, W. J. (2011b). Sistem Tata Kelola Teknologi Informasi. Andi.
- Abdillah. (2011a). Gotong Royong Cermin Budaya Bangsa Dalam Arus Globalisasi. STMIK Amikom.
- Ahmad, H. J. (2012). Penerapan Prinsip Transparansi, Partisipatif, dan Akuntabilitas dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Sidenreng Rappang. JIA, 1(1).
- Al Fatta, H. (2007). Analisis dan Perencanaan Sistem Informasi. Andi Offset.
- Anwar, E. S. (2018). *Dinamika Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa Sebagai Upaya Peningkatan Daya Saing Desa di Kabupaten Banyuwangi*. Universitas Jember.
- Ariski, N. A., & Asy'ari, M. A. (2022). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa "Jaya Tirta." *JUARA: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 230–249.
- Caya, M. F. N., & Rahayu, E. (2019). Dampak BUMDes Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Aik Batu Buding, Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung. *Journal Of Social Welfare*, 20(1). 1-12.
- Dann, S. (2011). Koordinasi, Alat Pemersatu Gerakan Administrasi. Intermedia.
- Effendi, M. A. (2009). *The Power of Corporate Governance: Teori dan*

- Implementasi. Salemba Empat Desa (BUMDes) Dengan Perspektif Good Governance di Desa Duren Kecamatan Klari Kabupaten Karawang. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 8(2), 208–221.
- Dilago, R., Lumolos, J., Waworundeng, & W. (2018). Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Soatobaru Kecamatan Galela Barat Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Gunawan (2011), *Dinamika Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa Sebagai Upaya Peningkatan Daya Saing Desa di Kabupaten Banyuwangi* Harjani Widiastuti. (2019). Menakar Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa di Indonesia.
- Irawan, S. (1999). Metode Penelitian Sosial. PT Remaja Rosdakarya. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis JEB*. Volume 22 No. 2 Oktober.
- Kinasih, I., Widiyahseno, B., & DJ, E. W. (2020). Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Memperkuat Perekonomian Masyarakat. *JAPD: Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 1(1), 33–44.
- Lestari, T. (2017). *Peran Pemerintah Desa Terhadap Pembangunan Perekonomian Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Mitra Usaha Mulya di Desa Marga Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2014-2015*. Universitas Riau.
- Nurcholis, H. (2013). Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Erlangga. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.
- Praditya, D. S. (2023). *Pengaruh Kompetensi Terhadap Kinerja Pengelola Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau*. Universitas Riau.
- Rahayu, S., & Febrina, R. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui BUMDES di Desa Sugai Nibung. *Jurnal Trias Politika*, 5(1), 49–59.
- Rosmaida, M., & Handayani, S. (2022). Peran Good Governance Dalam Meningkatkan Kinerja BUMDES Desa Sidobandung Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro. *MEA: Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi Dan Akuntansi*, 6(2), 697–715.
- Siga W. D. (2020). Peranan Badan Usaha Milik Desa Terhadap Pengelolaan Potensi Desa Bagi Kesejahteraan Masyarakat Kajian Pada BUMDes Malar Walatra, Desa Subang, Kecamatan Subang, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. *Inovasi*. 7(1). 32–41.
- Sinyo, H. S. (1999). Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah. Sinar Harapan.
- Siswanto. (2013). Pengantar Manajemen. Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Syafie, I. K. (2003). Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia. PT Bumi Aksara. Syafikri, A. S., Hakim, L., & Ramdani, R. (2021). Analisis Tata Kelola Badan Usaha Milik
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Badan Usaha Milik Desa.

